



Keadilan Sosial bagi Kaum Rentan dan Terpinggirkan dalam Perspektif Etika Relasional Judith Butler

Yosef Gunawan

Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma

wawanyosep28@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan bersama selalu hadir kelompok rentan dan terpinggirkan akibat ketidakadilan sosial, yang kerap mengalami penindasan sehingga hak dan martabatnya terabaikan. Situasi ini menuntut pengakuan yang sungguh-sungguh atas kemanusiaan mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama. Judith Butler menawarkan etika relasional sebagai kerangka untuk memahami kerentanan dan marginalisasi manusia. Penelitian ini bertujuan menggali pemikirannya sebagai dasar analisis realitas kelompok tertindas. Dua pertanyaan utama diajukan: bagaimana realitas kehidupan kaum tertindas dan terpinggirkan di tengah kehidupan bersama? Bagaimana konsep etika relasional Judith Butler menawarkan dasar etis untuk membangun kehidupan berkeadilan bersama mereka? Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika relasional menekankan pengakuan dan kerentanan sebagai kondisi dasar manusia yang saling bergantung, sehingga pengakuan timbal balik menjadi fondasi keadilan sosial dan kemanusiaan.

Kata Kunci

Etika Relasional; Judith Butler; Kaum Rentan dan Terpinggirkan; Keadilan Sosial.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk yang hidup dalam kebersamaan, manusia tidak dapat hidup secara individu dan terisolasi. Mereka membutuhkan kehadiran orang lain sebagai mitra dalam interaksi, sehingga kebersamaan menjadi kondisi yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia.

Dalam kehidupan komunal ini, manusia tidak hanya diminta untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya, tetapi juga dituntut untuk menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, agar sejalan dengan identitasnya sebagai makhluk sosial. Namun, dalam dinamika kehidupan sosial, seringkali terjadi fenomena ketidakadilan yang berasal dari sikap egois individu tertentu yang mengabaikan keberadaan dan hak-hak orang lain. Pada akhirnya, manusia

tidak lagi saling menghormati hak, kehormatan, dan martabat, melainkan saling memandang sebagai objek yang tidak berbeda dengan barang belaka.¹ Fenomena ini terus mengakar dalam sejarah manusia, meskipun manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam hubungan sosial. Ada banyak insiden ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini. Tidak hanya dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga dalam bentuk diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan kelas, diskriminasi terhadap kelas sosial tertentu, dan marginalisasi gender.²

Realitas seperti ini menuntut kesadaran akan pentingnya refleksi etis. Refleksi semacam itu diperlukan untuk mengkaji kembali akar masalah umat manusia, cara manusia saling memandang, dan upaya membangun struktur sosial yang lebih tertib di mana keadilan ditegakkan oleh semua pihak. Dalam membahas masalah ini, sosok yang dibahas dalam artikel ini adalah Judith Butler, seorang filsuf kontemporer yang telah menghasilkan banyak karya penting tentang gender, kekuasaan, dan etika. Salah satu kontribusi signifikan Butler terletak pada pemikirannya tentang relasionalitas, yang tercermin dalam dua gagasan utama, yaitu etika pengakuan dan kerentanan.³ Ada banyak pemikiran tentang pentingnya pengakuan dalam hubungan manusia. Misalnya, Axel Honneth berbicara tentang pengakuan dalam konteks sosial (perjuangan untuk pengakuan) dan menyoroti perjuangan sosial untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, ada

Charles Taylor, yang menekankan pengakuan sebagai kebutuhan dasar untuk identitas dalam masyarakat multikultural, dan Levinas, yang melihat etika pengakuan dalam kaitannya dengan "Yang Lain." Namun, Butler menawarkan sesuatu yang baru. Butler tidak hanya berbicara tentang perlunya pengakuan tetapi juga mengungkapkan kerentanan universal dan hubungan relasional. Pendekatan Butler berusaha untuk secara kritis memeriksa struktur kekuasaan (kekuatan struktural) yang merupakan salah satu penyebab tidak adanya penghargaan terhadap "yang lain".

Dalam pandangan Butler, etika relasional bukan hanya tindakan sukarela atau pilihan moral yang penuh kasih dari individu, tetapi menyentuh langsung pada esensi kemanusiaan itu sendiri. Pengakuan kerentanan manusia adalah struktur relasional yang melekat pada sifat manusia. Manusia memahami dan membentuk dirinya sendiri melalui hubungan dengan orang lain dan melalui pengakuan yang mereka terima dari orang lain. Oleh karena itu, penolakan untuk membangun hubungan dalam bentuk pengakuan—baik terhadap individu maupun terhadap kehidupan tertentu—pada dasarnya adalah tindakan yang mengurangi dasar relasional umat manusia itu sendiri. Etika relasional Butler menekankan pentingnya pengakuan sesama manusia dalam semua kerentanan mereka, tanpa diskriminasi. Model etika ini menolak pandangan yang memahami pengakuan sebagai tindakan sepihak kelompok dominan terhadap yang lemah. Sebaliknya,

¹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 80–81, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

² Ayten Gündoğdu, "Critical Phenomenology of Racial Vulnerability: Judith Butler and the Rodney King

Trial," *American Political Science Review*, published online ahead of print, 2025, 3, <https://doi.org/10.1017/S0003055425100932>

³ Judith Butler, *Prekarious Life: The Powers of Mourning and Violence* (London: Verso, 2004), 130.

pengakuan dipahami sebagai hubungan timbal balik yang mendasar dan konstitutif untuk kehidupan manusia bersama.

Tulisan ini didasarkan pada kesadaran etis untuk membela kelompok terpinggirkan atau mereka yang terpinggirkan. Membela kelompok-kelompok ini tidak cukup melalui pemenuhan hak-hak formal saja, tetapi harus berakar pada kesadaran etis yang lebih dalam dan lebih mendasar. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mencoba mengkaji pemikiran Judith Butler sebagai kerangka analisis untuk memahami realitas kehidupan masyarakat marjinal yang mengalami penindasan. Maka dari itu, pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas kehidupan mereka yang tidak dikenali dapat dipahami, dan bagaimana konsep etika relasional Butler dapat memberikan dasar etis untuk pengakuan kehidupan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Butler mengarah pada etika relasional yang menjadikan pengakuan kerentanan bersama sebagai dasar keadilan sosial. Kesadaran ini penting tidak hanya untuk membela yang tertindas, tetapi juga untuk membongkar sistem kekuasaan yang secara struktural membentuk hierarki sosial. Dengan demikian, pengembangan etika pengakuan dan kerentanan seperti yang dirumuskan oleh Butler dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan orang-orang yang terpinggirkan dan membangun tatanan sosial yang lebih adil dan merata

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna suatu peristiwa, interaksi, atau perilaku sosial dalam konteks tertentu, berdasarkan kerangka teori tertentu.⁴ Pendekatan ini tidak mengandalkan prosedur statistik dalam memperoleh dan menganalisis data, tetapi menekankan interpretasi yang mendalam dan reflektif terhadap realitas sosial yang sedang dipelajari.⁵ Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang berbagai fenomena, baik alam maupun yang merupakan hasil konstruksi atau rekayasa manusia.⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan studi pustaka dan observasi tidak langsung. Studi Pustaka menggunakan dua model sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya adalah buku yang ditulis oleh Judith Butler yang berjudul *Precarious life: The powers of mourning and violence*, *The Psychic Life of Power* dan *Giving an account of oneself*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku, artikel, majalah dan tulisan-tulisan di website yang membahas tentang pemikiran Judith Butler tentang kaum rentan dan terpinggirkan. Dalam observasi, penulis memfokuskan pada pengamatan pada video di youtube dan berbagai postingan di media sosial untuk menambah data tentang realitas kehidupan kaum rentan dan terpinggirkan. Dari kedua

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

⁵ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 3

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11

metode tersebut, penulis bisa secara sistematis membahas mengenai topik yang akan diangkat dalam tulisan ini. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan, yang dieksplorasi melalui etika relasional Judith Butler.

Isi atau Pembahasan

Subjektivitas Relasional

Manusia adalah subjek yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam masyarakat, manusia dibentuk melalui hubungan dengan orang lain, sehingga subjektivitas manusia adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, politik, dan bahasa. Tidak ada individu yang sepenuhnya otonom, melainkan menjadi subjek melalui pengakuan, penilaian, dan struktur sosial yang mengelilinginya.⁷ Pemikiran Judith Butler tentang subjektivitas manusia dipahami sebagai hasil dari proses performatif yang terjadi terus menerus dalam diri individu ketika mereka bertemu dengan orang lain. Identitas seseorang, terutama identitas gender, tidak dipahami sebagai sesuatu yang tetap atau esensial, tetapi sebagai konstruksi yang terbentuk, diulang, dan dinegosiasikan melalui kekuatan bahasa, norma sosial, dan struktur kekuasaan yang mengelilinginya. Pembentukan subjektivitas dalam diri seseorang tidak berasal dari esensi individu yang otonom, tetapi muncul melalui hubungan sosial dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan sosial, individu membentuk dan dibentuk oleh berbagai

norma, praktik bahasa, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Oleh karena itu, bagi Butler, subjektivitas selalu hadir dalam dan melalui hubungan dengan orang lain. Individu tidak pernah ada dalam isolasi, tetapi selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain dalam proses menjadi diri mereka sendiri.⁸

Subjektivitas dalam pemikiran Judith Butler tidak hanya dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui bahasa dan norma, tetapi juga sebagai bidang etika di mana manusia saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika seseorang menjadi subjek melalui proses pengakuan sosial, pada saat yang sama mereka juga menjadi rentan terhadap cara masyarakat menilai, melabeli, dan mengakui keberadaan mereka. Dalam konteks ini, etika Butler muncul dari kesadaran bahwa setiap bentuk subjektivitas selalu terbentuk dalam kaitannya dengan orang lain. Dengan kata lain, menjadi subjek berarti selalu berada dalam jaringan ketergantungan dan keterikatan sosial. Menurut Butler, subjektivitas adalah dasar untuk etika relasional: etika yang didasarkan pada kesadaran akan keterikatan, kerentanan, dan tanggung jawab terhadap kehidupan lain. Etika ini menolak pandangan otonom subjek dan menggantinya dengan pemahaman bahwa menjadi manusia berarti selalu hidup dalam jejaring sosial yang menuntut pengakuan, empati, dan tanggung jawab terhadap orang lain.

⁷ Amelia Rugun Sirait, "Subjektivitas dan Relasi Sosial dalam Instagram" (skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020), 10.

⁸ M. Yaghoubi-Notash, V. N. Mohammad, and M. Soufiani, "Language, Gender and Subjectivity from

Judith Butler's Perspective," *Philosophical Investigations* 13, no. 28 (2019): 307, <https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32522.2276>.

Dalam karyanya *The Psychic Life of Power*, Butler menunjukkan bahwa proses pembentukan subjek tidak semata-mata hasil dari tekanan sosial, tetapi juga melibatkan motivasi psikologis atau batin.⁹ Dia menolak pandangan bahwa manusia hanyalah korban pasif dari norma sosial; sebaliknya, dia menegaskan bahwa ada dimensi psikologis dan dorongan batin atau motivasi internal yang membuat individu secara tidak sadar berpartisipasi dalam proses pembentukan diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa subjek tidak hanya dibentuk "dari luar" oleh kekuatan sosial, tetapi juga "dari dalam" melalui mekanisme psikologis seperti rasa bersalah, keinginan untuk dikenali, atau kebutuhan untuk dicintai. Namun, pada tahap ini, Butler masih memandang proses subjektivitas terutama dalam hal hubungan antara individu dan norma, bukan antara individu dan manusia lain secara langsung. Dengan kata lain, dia masih menekankan hubungan vertikal antara subjek dan struktur kekuasaan, belum menyoroiti hubungan horizontal antara manusia sebagai ruang etis.

Kerentanan sebagai Kondisi Dasar Manusia

Dalam kehidupan komunal, manusia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari komunitas, terikat bersama dalam jaringan hubungan yang saling bergantung. Seorang individu memperoleh eksistensi ketika orang lain mengenalinya, yang berarti bahwa keberadaan kita bergantung pada hubungan dan hubungan kita dengan orang lain. Kesadaran ini menegaskan bahwa,

sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kerentanan yang melekat. Kerentanan dipahami sebagai kondisi dasar manusia sebagai makhluk hidup yang menunjukkan ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain dalam jejaring sosial dan alam.¹⁰ Jika manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rentan, maka sistem dan norma sosial harus dibangun di atas kesadaran akan keterkaitan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Bagi Judith Butler, kerentanan bukan hanya kondisi tambahan atau keadaan luar biasa yang dialami oleh manusia dalam situasi tertentu, melainkan kondisi eksistensial yang mendasar dan tak terelakkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan fisik.

Butler memandang kerentanan sebagai dasar etis dan politik kehidupan komunal. Dia menolak pandangan individualistis yang cenderung menekankan kemandirian dan pengendalian diri sebagai ukuran kemanusiaan.¹¹ Sebaliknya, dia menegaskan bahwa keterikatan dan ketergantungan pada orang lain adalah kondisi yang membentuk umat manusia itu sendiri. Dengan kata lain, menjadi manusia berarti dihadapkan kepada orang lain, baik pada kebaikan maupun kekerasan. Terlepas dari kerentanan ini, itu juga terkait erat dengan berkabung. Ketika manusia berduka atas kehilangan, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa orang lain; kehilangan mengungkapkan bahwa identitas dan keberadaan kita dibentuk oleh hubungan yang telah hilang. Melalui proses berkabung, manusia mengalami transformasi diri, karena kehilangan membuat mereka sadar

⁹ Isadora Cyfer, "What's the Trouble with Humanity? A Feminist Critique of Judith Butler's Ethics of Vulnerability," *Digithum*, no. 23 (2019): 3.

¹⁰ Marco Longo and Valentina Lorubbio, "Vulnerability: From the Paradigmatic Subject to a New Paradigm of

the Human Condition? An Introduction," *International Journal for the Semiotics of Law* 36, no. 4 (2023): 1361, <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09999-6>

¹¹ Butler, *Precarious Life*, 124.

akan hubungan mendalam mereka dengan kehidupan lain. Dalam pengertian ini, berkabung menjadi proses etis dan politik, karena dari sanalah kesadaran akan keterkaitan dan tanggung jawab terhadap orang lain muncul.

Pengakuan kerentanan adalah inti dari etika Judith Butler. Butler menegaskan bahwa tidak semua nyawa dianggap menyedihkan karena negara dan lembaga sosial-politik membentuk kerangka kerja yang memutuskan siapa yang diakui sebagai "hidup" dan siapa yang dapat dihapus tanpa dianggap rugi. Dengan demikian, berkabung menjadi cermin dari struktur kekuasaan yang mengungkapkan siapa yang diakui sebagai manusia dan siapa yang dikeluarkan dari ranah kemanusiaan. Namun, bagi Butler, berkabung juga memiliki kekuatan transformatif: ketika masyarakat mulai mengenali dan meratapi kehidupan yang sebelumnya dikecualikan, kemungkinan solidaritas baru dan kesadaran akan kerentanan bersama muncul, yang menjadi dasar etika dan politik kemanusiaan. Oleh karena itu, bagi Butler, tindakan berkabung adalah pengakuan akan keterkaitan yang rapuh antara manusia, dan di dalamnya terdapat potensi untuk mengatur kembali tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Ontologi tubuh

Bagi Judith Butler, etika relasional dalam pengakuan kerentanan adalah inti dari etika dan politik tanpa kekerasan. Ia berawal dari pemahaman bahwa kehidupan manusia selalu diwujudkan dalam tubuh yang secara

ontologis rentan dan saling bergantung.¹² Kerentanan ini bukanlah kelemahan, melainkan kondisi mendasar yang memungkinkan kita untuk hidup, berhubungan dengan orang lain, dan mengalami cinta, harapan, dan penderitaan. Karena tubuh kita selalu terbuka bagi orang lain dan kekuatan eksternal, kemandirian mutlak atau "kebal" hanyalah fantasi. Ontologi tubuh Butler berusaha memahami makna eksistensial eksistensi manusia sebagai tubuh yang diwujudkan, yaitu bahwa manusia tidak hanya "memiliki" tubuh, tetapi "menjadi" tubuh yang selalu berhubungan dengan dunia dan orang lain. Dalam kerangka ini, Butler menegaskan bahwa tubuh bukanlah entitas otonom atau tertutup, tetapi selalu terbuka terhadap lingkungan sosial, politik, dan material yang mendukungnya. Oleh karena itu, keberadaan tubuh selalu ditandai dengan tiga kondisi konstitutif utama: kerentanan, saling ketergantungan, dan ketidakpastian ontologis.¹³

Ketiga kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya bergantung dan terekspos: kita dapat terluka, kita membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, dan kita bergantung pada sistem sosial dan ekonomi untuk terus hidup. Kerentanan menunjukkan keterbukaan tubuh terhadap cedera dan pengaruh eksternal; Saling ketergantungan menandakan bahwa tidak ada kehidupan yang berdiri sendiri, karena kita selalu saling mendukung; sementara ketidakpastian ontologis menegaskan bahwa kelangsungan

¹² J. Wearing, "Ontology as a Guide to Politics? Judith Butler on Interdependency, Vulnerability, and Nonviolence," *Ergo: An Open Access Journal of Philosophy* 9, no. 35 (2023): 915, <https://doi.org/10.3998/ergo.2624>

¹³ Nenadyshchuk, "From Bodily Ontology to the Ethics of Nonviolence: The Role of Vulnerability as Interdependence in J. Butler's Ethical-Political Thought," *Russian Sociological Review* 23, no. 1 (2024): 285, <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-1-279-301>

hidup manusia bergantung pada kondisi sosial yang rapuh dan tidak pasti. Jadi, bagi Butler, menjadi tubuh berarti hidup dalam jaring saling keterkaitan dan ketergantungan yang tak terhindarkan, kondisi mendasar yang berfungsi sebagai titik awal untuk refleksi etis dan politik tentang tanggung jawab terhadap orang lain. Selain itu, kegagalan untuk mengakui kerentanan ini adalah bentuk kegagalan etis dan sumber kekerasan sosial-politik. Kekerasan, bagi Butler, muncul ketika individu atau kelompok menolak untuk mengakui keterbatasan dan ketergantungan yang melekat pada mereka, yaitu, ketika fantasi kedaulatan dan kekebalan absolut muncul, sering dimanifestasikan dalam bentuk militerisme atau individualisme ekstrem. Sebaliknya, pengakuan kerentanan membuka ruang untuk empati, respons moral terhadap penderitaan orang lain, dan kesadaran bahwa semua kehidupan memiliki nilai yang sama untuk dilindungi dan didukung (*grievability*). Dengan demikian, politik tanpa kekerasan menjadi bentuk konkret dari pengakuan ini, yaitu cara hidup dan politik yang menghormati keterkaitan sosial dan menentang struktur ketimpangan yang membuat beberapa kehidupan lebih rentan terhadap bahaya atau pengabaian daripada yang lain.

Potret Komunitas Rentan dan Terpinggirkan

Istilah "kelompok rentan dan terpinggirkan" selalu menekankan adanya diskriminasi, ketidaksetaraan, dan pengucilan dalam kehidupan. Pengecualian hak atas sumber

daya, partisipasi, dan bahkan pengambilan keputusan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik merupakan situasi nyata yang dialami oleh kelompok rentan dan terpinggirkan. Fakta ini tentu bertentangan dengan konsep hak yang menjadi dasar sifat manusia.¹⁴ Selain itu, orang yang rentan dan terpinggirkan selalu dianggap lemah, kurang, berbeda, dan tidak berdaya, sehingga mereka cenderung mengalami segala macam kekerasan sistemik, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Masalah kelompok terpinggirkan adalah masalah global. Dalam kasus tertentu, setiap wilayah memiliki konteksnya sendiri, tetapi benang merahnya adalah bahwa masalah kelompok rentan dan terpinggirkan mengartikulasikan situasi ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan. Manifestasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok marjinal memiliki banyak bentuk, seperti rasisme, kekerasan budaya, xenofobia, kemiskinan, tindakan kekerasan, diskriminasi, dan kesenjangan kekuasaan antara pejabat dan masyarakat. Di bawah ini adalah dua faktor yang merangkum semua alasan terkait munculnya kelompok rentan dan terpinggirkan.

Kurangnya Pengakuan Sosial

Tidak adanya pengakuan adalah salah satu sumber kerentanan dan marginalisasi. Pengakuan adalah dasar bagi keberadaan manusia dalam bidang sosial. Lingkup sosial menegaskan hubungan antar manusia, yang mengandung nilai pengakuan yang bersifat relasional dan performatif harus ditunjukkan atau ditampilkan.¹⁵ Pengakuan adalah simbol legitimasi, hak, dan martabat

¹⁴ A. R. Fadilla, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional," *Ranah Research Journal* 7, no. 6 (2025): 4761, <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1747/1524>

¹⁵ K. Kenny, review of *Frames of War: When Is Life Grievable?*, *Journal of Power* (2010): 462, <https://doi.org/10.1080/17540291.2010.525837>

seorang manusia. Tanpa pengakuan, manusia akan diabaikan, terasing, terpinggirkan, bahkan dianggap tidak ada, seperti yang dialami oleh kelompok terpinggirkan saat ini. Pengakuan sosial bukan sekadar penerimaan simbolis tetapi, lebih dari itu, itu adalah prasyarat untuk memiliki hak, suara, dan tempat. Namun, ketika prasyarat ini diabaikan, terjadi proses yang secara sistematis mendorong individu atau bahkan sekelompok orang ke pinggiran.¹⁶

Proses marginalisasi terjadi ketika norma sosial, budaya, dan politik yang dominan menjadi standar untuk menentukan kriteria siapa yang dianggap "normal", layak, dan berharga. Sebaliknya, mereka yang tidak sesuai dengan kriteria ini dianggap sebaliknya. Individu dan kelompok yang dianggap tidak normal, tidak layak, atau kurang bernilai seperti minoritas, penyandang disabilitas, orang miskin dan tidak berpendidikan, mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau status sosial, dan, dalam konteks tertentu, mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka, seperti migran dan orang-orang dengan identitas "pelangi" (komunitas LGBTQ) seringkali tidak diakui sebagai anggota penuh masyarakat. Akibatnya, mereka sering mengalami ketidakadilan di banyak bidang kehidupan, termasuk domain sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik.¹⁷

Dalam kerangka ketiadaan pengakuan ini, Judith Butler mengartikulasikan konsepnya tentang etika pengakuan. Dalam perspektif

ini, Butler menekankan pentingnya pengakuan dalam kehidupan relasional manusia. Manusia tidak hanya secara inheren berorientasi pada hubungan; Lebih dari itu, pengakuan terkait erat dengan tanggung jawab etis. Mengakui orang lain sebagai sesama manusia yang rentan memerlukan kewajiban untuk melindungi kerentanan bersama itu, kewajiban yang, menurut Butler, hanya dapat diungkapkan dan diwujudkan melalui tindakan pengakuan.

Kekerasan Simbolis dan Pengucilan Sosial

Kekerasan simbolis dan pengucilan sosial adalah dua konsep penting untuk memahami bagaimana ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial beroperasi dengan cara yang halus namun sistematis dalam masyarakat. Kekerasan simbolis adalah istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Pierre Bourdieu, mengacu pada bentuk tersembunyi dominasi sosial yang dilakukan melalui bahasa, simbol, norma, dan institusi yang membuat ketidaksetaraan tampak alami atau sah.¹⁸ Sementara itu, pengucilan sosial mengacu pada proses di mana individu atau kelompok secara sistematis kehilangan akses ke sumber daya, kesempatan, dan partisipasi sosial yang seharusnya menjadi hak mereka. Bagi orang-orang yang terpinggirkan, bentuk pengucilan sosial yang paling mendasar adalah penolakan untuk mengakui mereka sebagai anggota penuh dari komunitas manusia yang rentan yang layak dirawat—suatu kondisi yang digambarkan oleh Judith

¹⁶ Ayten Gündoğdu, "A Critical Phenomenology of Racialized Vulnerability: Judith Butler and the Rodney King Trial," *American Political Science Review*, published online ahead of print, 2025, 479, <https://doi.org/10.1017/S0003055425100932>

¹⁷ Gündoğdu, "A Critical Phenomenology of Racialized Vulnerability," 484

¹⁸ Mustikasari, Arlin, and S. A. Kamaruddin, "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>

Butler sebagai *tidak layak* huni dan *tidak dapat didukung*.

Bagi kelompok yang terpinggirkan, kedua proses ini tidak hanya menghasilkan penderitaan material tetapi juga krisis identitas, perasaan tidak berharga, dan hilangnya ruang untuk menuntut hak-hak mereka. Kekerasan simbolis beroperasi secara halus karena tidak diberlakukan melalui kekuatan fisik tetapi melalui legitimasi budaya dan struktur sosial yang sudah dianggap normal. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang terpinggirkan sering menerima status inferior mereka tanpa perlawanan terbuka, karena mereka telah disosialisasikan untuk percaya bahwa situasi mereka dihasilkan dari kegagalan pribadi daripada struktur sosial yang menindas. Dengan cara ini, kekerasan simbolis menetralkan potensi perlawanan dan mempertahankan dominasi kelompok kuat.¹⁹

Pengucilan sosial, sebagai konsekuensi nyata dari kekerasan simbolis dan ketidaksetaraan struktural, mengungkapkan bagaimana kelompok terpinggirkan tidak hanya kehilangan akses ekonomi tetapi juga pendidikan, perawatan kesehatan, partisipasi politik, dan ruang budaya. Mereka dikecualikan dari proses pengambilan keputusan dan sering ditolak pengakuan dalam hubungan sosial. Dalam banyak kasus, pengucilan tersebut bahkan diperkuat oleh kebijakan negara atau sistem hukum yang tidak peka terhadap kondisi dan kebutuhan kelompok minoritas. Hal ini menghasilkan lingkaran setan kemiskinan

dan keterasingan sosial yang sulit dipatahkan.

Namun, penting untuk mengakui bahwa kekerasan simbolis dan pengucilan sosial bukanlah proses yang melampaui perlawanan. Kesadaran kritis merupakan langkah pertama dalam membongkar kekuatan yang tersembunyi di dalam simbol dan struktur sosial. Pendidikan kritis yang didasarkan pada etika berorientasi pengakuan yang diartikulasikan oleh Butler membuka ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan untuk merebut kembali hak dan martabat mereka. Perlawanan terhadap kekerasan simbolis tidak selalu berbentuk protes publik; Hal ini juga dapat terjadi melalui transformasi bahasa (pemberian pengakuan), membongkar stereotip, dan menjaga kerentanan bersama dengan menciptakan ruang aman bagi semua manusia. Hanya dengan mengekspos dan membongkar mode-mode penindasan yang halus ini, struktur sosial yang benar-benar inklusif untuk semua dapat direalisasikan.

Membela Yang Terpinggirkan: Penerapan Etika Relasional

Pengakuan merupakan fondasi yang kuat dan penting dalam upaya membela kelompok-kelompok terpinggirkan melalui tindakan dan praksis konkret. Selain itu, pengakuan memberikan dasar teoretis untuk mengadvokasi hak dan martabat baik individu maupun komunitas yang terpinggirkan (Deranty & Renault, 2007).²⁰ Salah satu pemikir yang paling intensif mengembangkan gagasan pengakuan adalah Axel Honneth. Sebagai seorang filsuf Jerman

¹⁹ Mustikasari, Arlin, and Kamaruddin, "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial," 12

²⁰ Jean-Philippe Deranty and Emmanuel Renault, "Politicizing Honneth's Ethics of Recognition," *Thesis*

Eleven 88, no. 1 (2007): 98.

<https://doi.org/10.1177/0725513607072459>

yang sangat dipengaruhi oleh Jürgen Habermas, Honneth berpendapat bahwa tuntutan pengakuan individu berfungsi sebagai kekuatan pendorong kemajuan sosial. Bagi Honneth, perjuangan untuk diakui bukan semata-mata masalah kepentingan tetapi tuntutan moral yang terkait dengan terwujudnya keadilan sosial bagi semua.

Di sisi lain, Judith Butler memulai refleksinya dari konsep kerentanan (kerawanan). Menurut Butler, kelompok terpinggirkan termasuk mereka yang mengalami stigmatisasi dan pengucilan sosial, seperti pekerja seks, korban rasisme, komunitas LGBTQIA+, dan populasi terpinggirkan lainnya. Kelompok-kelompok ini sering diposisikan sebagai "kurang dari manusia" karena mereka ditempatkan di luar norma-norma sosial yang dominan. Dalam konteks ini, pengakuan menjadi krusial karena bertujuan untuk mewujudkan kebebasan dan otonomi relasional bagi setiap individu. Dengan demikian, membela kelompok marjinal melalui etika relasional membuka kemungkinan bagi semua orang termasuk mereka yang terpinggirkan untuk mengalami kehidupan yang bermartabat dan layak.

Solidaritas Berdasarkan Kerentanan Universal

Konsep kerentanan merupakan fondasi munculnya empati dan solidaritas dalam membela orang-orang yang terpinggirkan. Bagi Judith Butler, *kegentingan* mengacu lebih khusus pada kondisi universal yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang bergantung pada dukungan

sosial dan emosional.²¹ Empati dan solidaritas dapat tumbuh dan menjadi dasar etis ketika kesadaran akan paradoks ini muncul. Kesadaran akan kerentanan bersama seperti itu mengarahkan manusia ke arah tindakan nyata untuk membantu mengatasi kerentanan orang lain. Solidaritas yang didasarkan pada kerentanan bersama menjadi terwujud sebagai *saling peduli*, yaitu, tindakan kepedulian timbal balik yang berakar pada pengakuan saling ketergantungan. Pengakuan saling ketergantungan ini menyoroti kondisi manusia sebagai tidak pernah sepenuhnya mandiri atau otonom tetapi selalu terikat secara relasional.

Pemikiran Butler muncul dari penolakan pandangan yang mendefinisikan manusia terutama sebagai individu yang independen, otonom, dan murni rasional. Perspektif seperti itu, dalam pandangannya, menumbuhkan asumsi bahwa manusia dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran orang lain. Butler malah menekankan bahwa kondisi mendasar manusia adalah kerentanan.

Secara sederhana, solidaritas tumbuh bukan dari identitas bersama tetapi dari kesadaran akan saling ketergantungan dan kerentanan. Memang, setiap manusia siapa pun mereka telah mengalami atau mungkin mengalami luka, kehilangan apa yang bermakna, penderitaan, dan bentuk-bentuk kerapuhan serupa. Dalam konteks Indonesia, solidaritas tersebut dapat berkembang pesat karena kerentanan sosial yang meluas, termasuk kemiskinan, ketidakadilan gender, perdagangan manusia, diskriminasi agama, dan banyak lainnya. Atas dasar kerentanan

²¹ Sturla J. Stålsett, "Naming Vulnerability: The Diaconal Designation Dilemma," *Diaconia* 11, no. 2

(2020): 127, <https://doi.org/10.13109/diac.2020.11.2.125>

bersama ini, berbagai kelompok sosial— termasuk masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemimpin agama membentuk aliansi yang didasarkan pada solidaritas dan empati terhadap kerentanan universal.

Membangun Etika Relasional untuk Keadilan Sosial

Etika relasional merupakan salah satu tema sentral dalam pemikiran Judith Butler. Bagi Butler, relasi menjadi prinsip dasar keterhubungan manusia yang menegaskan bahwa tidak ada individu yang dapat berdiri sepenuhnya otonom dan terlepas dari yang lain. Dalam pandangannya, manusia selalu hidup dalam jaringan ketergantungan sosial yang membentuk identitas dan keberadaannya. Karena itu, tanggung jawab etis tidak lahir dari kemandirian absolut, melainkan dari kesadaran akan keterbatasan, ketidakcukupan, dan keterhubungan manusia dengan sesamanya.²² Dalam kerangka etika relasional tersebut, Butler membedakan antara *precariousness* dan *precarity*. *Precariousness* menunjuk pada kerentanan eksistensial yang bersifat universal, yakni kondisi dasar manusia sebagai makhluk yang rapuh, terbatas, dan saling bergantung satu sama lain. Setiap manusia pada dasarnya dapat mengalami kehilangan, penderitaan, maupun keterancaman hidup. Sementara itu, *precarity* merujuk pada kerentanan yang diproduksi secara sosial, politik, dan struktural, di mana kelompok tertentu ditempatkan dalam kondisi hidup yang lebih rentan akibat ketidakadilan sistemik, diskriminasi, kemiskinan, kekerasan, maupun marginalisasi sosial. Dengan demikian, tidak semua kerentanan

dialami secara setara, sebab struktur kekuasaan turut menentukan siapa yang lebih mudah mengalami penderitaan dan keterasingan sosial.

Melalui perspektif tersebut, Butler menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan atau meniadakan martabat manusia, terutama terhadap kelompok-kelompok yang hidup dalam kondisi *precarity*. Perlakuan yang penuh penghakiman moral terhadap individu atau kelompok rentan justru menciptakan jarak antara mereka yang menghakimi dan mereka yang dihakimi. Relasi yang seharusnya bersifat timbal balik dan setara berubah menjadi relasi kuasa antara pihak yang dominan dan pihak yang dilemahkan, sehingga melahirkan sikap superioritas sosial. Oleh sebab itu, Butler menegaskan bahwa etika relasional yang sejati hanya dapat diwujudkan ketika manusia mampu mengakui kerentanan bersama tanpa dorongan untuk mendominasi sesama. Pengakuan atas kerentanan tersebut membuka ruang solidaritas dan tanggung jawab etis untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi mereka yang hidup dalam kondisi rentan.

Relevansi

Pemikiran Judith Butler, khususnya mengenai etika relasional, memiliki relevansi yang mendalam bagi konteks global maupun Indonesia yang hingga kini masih diwarnai oleh kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan struktural. Butler menegaskan bahwa *precariousness* sebagai kerentanan universal merupakan kondisi yang mengikat seluruh manusia

²² Judith Butler. "Giving an Account of Oneself. 31, no. 4 (2001): 30.

dalam relasi saling ketergantungan. Namun, dalam realitas sosial-politik, struktur kekuasaan sering kali menghasilkan *precarity*, yaitu kondisi kerentanan yang dialami secara tidak merata oleh kelompok tertentu, seperti masyarakat miskin, minoritas, korban konflik, perempuan, maupun kelompok yang termarginalkan secara sosial dan politik.

Dalam konteks tersebut, Butler memperkenalkan konsep *grievability* atau “keberhargaan untuk diratapi,” yakni pengakuan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai dan layak untuk diakui kehilangan maupun penderitaannya. Akan tetapi, dalam masyarakat yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang, tidak semua kehidupan diperlakukan setara. Ada kehidupan tertentu yang dianggap lebih bernilai, sementara kehidupan lainnya dipandang “tidak layak diratapi” atau tidak cukup penting untuk memperoleh perhatian moral dan sosial. Akibatnya, penderitaan kelompok rentan sering kali diabaikan, dinormalisasi, bahkan dilupakan oleh sistem sosial maupun politik.

Melalui etika relasional, Butler mendorong lahirnya kesadaran etis bahwa setiap manusia terikat dalam relasi tanggung jawab terhadap sesamanya. Kesadaran akan kerentanan bersama tersebut menjadi dasar untuk membangun solidaritas sosial dan memperjuangkan keadilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, pemikiran Butler tidak hanya relevan sebagai refleksi filsafat kontemporer, tetapi juga sebagai kritik etis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Daftar Pustaka

- A. R. Fadilla. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional.” *Ranah Research Journal* 7, no. 6 (2025): 4760–4771.
<https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1747/1524>.
- Amelia Rugun Sirait. “Subjektivitas dan Relasi Sosial dalam Instagram.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Ayten Gündoğdu. “A Critical Phenomenology of Racialized Vulnerability: Judith Butler and the Rodney King Trial.” *American Political Science Review*. Advance online publication, 2025, 477–489.
<https://doi.org/10.1017/S0003055425100932>.
- Eko Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 80–87.
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- Feny Rita Fiantika, M. Wasil, S. Jumiyati, L. Honesti, S. Wahyuni, E. Mouw, Jonata, I. Mashudi, N. Hasanah, A. Maharani, K. Ambarwati, R. Noflidaputri, Nuryami, and L. Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Isadora Cyfer. “What’s the Trouble with Humanity? A Feminist Critique of Judith Butler’s Ethics of Vulnerability.” *Digithum*, no. 23 (2019): 1–15.
<https://doi.org/10.7238/d.v0i23.3157>.
- J. Wearing. “Ontology as a Guide to Politics? Judith Butler on Interdependency, Vulnerability, and Nonviolence.” *Ergo: An Open Access Journal of Philosophy* 9, no. 35 (2023): 911–942.
<https://doi.org/10.3998/ergo.2624>.
- Jean-Philippe Deranty, and Emmanuel Renault. “Politicizing Honneth’s Ethics of Recognition.” *Thesis Eleven* 88, no. 1 (2007): 92–111.
<https://doi.org/10.1177/0725513607072459>.
- Judith Butler, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso, 2004.
- Judith Butler. “Giving an Account of Oneself.” *Diacritics* 31, no. 4 (2001): 22–40.

K. Kenny. "Frames of War: When Is Life Grievable?" *Journal of Power* (2010): 461–463.

<https://doi.org/10.1080/17540291.2010.525837>.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Yaghoubi-Notash, V. N. Mohammad, and M. Soufiani. "Language, Gender and Subjectivity from Judith Butler's Perspective." *Philosophical Investigations* 13, no. 28 (2019): 305–315.

<https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32522.2276>.

Marco Longo, and Valentina Lorubbio. "Vulnerability: From the Paradigmatic Subject to a New Paradigm of the Human Condition? An Introduction." *International Journal for the Semiotics of Law* 36, no. 4 (2023): 1359–1369.

<https://doi.org/10.1007/s11196-023-09999-6>.

Mustikasari, Arlin, and S. A. Kamaruddin. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6, no. 1 (2023): 9–14.

<https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.

Nenadyshchuk. "From Bodily Ontology to the Ethics of Nonviolence: The Role of Vulnerability as Interdependence in J. Butler's Ethical-Political Thought." *Russian Sociological Review* 23, no. 1 (2024): 279–298. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-1-279-301>.

Sturla J. Stålsett. "Naming Vulnerability: A Diaconal Dilemma of Designation." *Diaconia* 11, no. 2 (2020): 125–140.

<https://doi.org/10.13109/diac.2020.11.2.125>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.